

# Implementasi Program Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Sinjai

Yusri<sup>1</sup>, Mochamat Nurdin<sup>2</sup>, Rajamemang<sup>3</sup>

Afiliasi: <sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi Penulis: [1\\*yusriosye@gmail.com](mailto:1*yusriosye@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan mengetahui bagaimana implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari adanya program pemerintah seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, penyuluhan dan edukasi, serta pemberian bantuan sosial. Faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Sinjai terdiri dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan anggaran yang tersedia, pembagian tugas antar sektor yang terlibat. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya kesadaran masyarakat, penyaluran bantuan untuk anak stunting yang belum merata, dan penanganan stunting yang belum memadai di masing-masing OPD terkait. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kesadaran masyarakat untuk mencari informasi terkait stunting baik sebelum menikah maupun setelah memiliki anak, ikut serta dan melakukan pemeriksaan rutin ke posyandu atau puskesmas terdekat, diharapkan Dinas Sosial menyalurkan bantuan stunting secara merata karena stunting tidak mengenal perbedaan status sosial. Dan diharapkan pemerintah dalam hal penanganan stunting menambah petugas gizi di setiap wilayah di Kabupaten Sinjai.

**Kata kunci:** Implementasi; Program Lintas Sektor; Penanganan Stunting

## ABSTRACT

*This research aims to obtain data and find out how cross-sector programs are implemented in handling stunting in Sinjai Regency, as well as knowing the factors that influence the implementation of cross-sector programs in handling stunting in Sinjai Regency. This research uses a qualitative descriptive method. This research data consists of primary data and secondary data obtained using observation, interview and documentation techniques. The research results show that the implementation of cross-sector programs in handling stunting in Sinjai Regency can be seen from the existence of government programs such as providing additional food for pregnant women and toddlers, counseling and education, and providing social assistance. The factors that support the implementation of the Cross-Sectoral Program in Handling Stunting in Sinjai Regency consist of HR (Human Resources) and available budget, division of tasks between the sectors involved. Meanwhile, inhibiting factors consist of a lack of public awareness, unequal distribution of aid for stunted children, and inadequate handling of stunting in each OPD involved. The implication of this research is that it is hoped that public awareness will seek information related to stunting both before marriage and after having children, participate and carry out routine checks at the nearest posyandu or community health center, it is hoped that the Social Service will distribute stunting assistance evenly because stunting does not recognize differences in social status. And it is hoped that the government, in terms of handling stunting, will add nutrition officers in each region in Sinjai Regency.*

**Keywords:** Implementation; Cross-Sectoral Program; Handling Stunting

# JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 5 No. 4 (2024): Community Empowerment Hal: 124-136

DOI: 10.55314/jcoment.v5i4.863

**Informasi Artikel:** Submit: 21-10-2024 Revisi: 14-11-2024 Diterima: 17-12-2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Kesehatan masyarakat, terutama di kalangan balita, adalah aspek penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas hidup. Namun, masalah seperti stunting masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, menyebabkan balita memiliki tubuh lebih pendek dari usia normalnya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga mental, sosial, dan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Di tahun 2017, lebih dari 35,6% balita di Indonesia mengalami stunting, melebihi batas toleransi WHO sebesar 20%. Meski angka ini menurun menjadi 30,8% pada 2018, prevalensi stunting di Indonesia tetap tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Faktor penyebabnya bersifat multidimensi, meliputi pola makan, pola asuh, sanitasi buruk, kemiskinan, serta rendahnya pemberdayaan perempuan. Intervensi yang paling efektif dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) karena masa ini menjadi penentu utama pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Stunting memiliki efek jangka pendek, seperti peningkatan risiko kematian dan gangguan perkembangan motorik serta verbal. Dalam jangka panjang, stunting berdampak pada tubuh dewasa yang tidak ideal, risiko penyakit, produktivitas rendah, dan menurunnya kapasitas belajar. Oleh karena itu, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan fokus pada gizi, sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, beberapa sektor harus bekerja bersama-sama dengan pendekatan yang komprehensif. Gizi yang buruk merupakan faktor utama penyebab stunting, yang berkaitan dengan asupan makanan yang tidak mencukupi kebutuhan gizi anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam hal ini, sektor kesehatan (misalnya dinas kesehatan dan petugas gizi) perlu memberikan intervensi yang tepat, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi, serta edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pemenuhan gizi anak. Tanpa perbaikan dalam aspek gizi, upaya penanggulangan stunting akan terhambat. Lingkungan yang tidak bersih atau tidak sehat, seperti kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, dapat memperburuk kondisi stunting. Kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi berulang, yang mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap gizi secara optimal, sehingga memperburuk keadaan stunting. Oleh karena itu, sektor terkait seperti pekerjaan umum (PU) dan lingkungan hidup harus memastikan adanya akses air bersih, pembuangan limbah yang aman, serta fasilitas sanitasi yang memadai untuk mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan

status gizi masyarakat.

Faktor sosial dan ekonomi yang rendah juga berkontribusi pada stunting, karena keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, peningkatan pendapatan keluarga, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, sangat penting untuk mendukung penanggulangan stunting. Kolaborasi dengan sektor sosial (misalnya dinas sosial) dapat menciptakan peluang bagi keluarga miskin untuk memperoleh bantuan sosial dan akses ke sumber daya yang diperlukan. kolaborasi lintas sektor dengan fokus pada gizi, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi serta sosial bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Semua sektor ini saling mendukung dan memperkuat upaya dalam mengurangi angka stunting secara efektif dan berkelanjutan.

Generasi yang sehat dan produktif adalah fondasi pembangunan bangsa, sehingga upaya pengentasan stunting menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Stunting berdampak buruk tidak hanya pada tumbuh kembang fisik anak, tetapi juga pada perkembangan emosional, kemampuan kognitif, dan ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun nasional. Dampaknya termasuk peningkatan belanja kesehatan dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak pemerintah, lembaga sosial, akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024. Penanganan stunting mencakup dua jenis intervensi meliputi Intervensi gizi spesifik Ditujukan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan kontribusi 30% pada penurunan stunting, bersifat jangka pendek, dan fokus pada sektor kesehatan. Intervensi gizi sensitif Menyumbang 70% penurunan stunting, dilakukan di luar sektor kesehatan, seperti pertanian, pendidikan, perikanan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan perempuan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan melalui langkah-langkah terintegrasi yang melibatkan berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, komunikasi, dan perlindungan sosial. Upaya ini harus dilakukan secara terpadu, berkesinambungan, dan mencakup promosi, pencegahan, pengobatan, serta rehabilitasi untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

**Tabel. Jumlah Stunting Perkecamatan di Kabupaten Sinjai 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Stunting
1	Sinjai Timur	125 Orang
2	Tellulimpoe	70 Orang
3	Sinjai Selatan	66 Orang
4	Sinjai Barat	44 Orang
5	Bulupoddo	36 Orang
6	Pulau Sembilan	35 Orang
7	Sinjai Utara	32 Orang
8	Sinjai Tengah	28 Orang
9	Sinjai Borong	27 Orang

Pendekatan ini diharapkan menghasilkan generasi sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi untuk mendukung pembangunan bangsa. Penanganan stunting memerlukan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen memimpin langsung upaya ini melalui pengintegrasian program nasional dan lokal. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri (12 Juli 2017), disepakati pentingnya pendekatan lintas sektoral. Strategi percepatan penurunan stunting melalui Lima Pilar dirumuskan pada rapat 9 Agustus 2017, yaitu Komitmen dan visi kepemimpinan, Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, Ketahanan pangan dan gizi, Pemantauan dan evaluasi. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, ditetapkan 8 rencana aksi konvergensi, meliputi analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, penguatan peran desa, pembinaan kader, pengelolaan data, publikasi, dan evaluasi kinerja tahunan. Intervensi dilakukan melalui gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan lintas sektor dari pusat hingga desa.

Menurut Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi stunting nasional menurun dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018), sementara balita dengan status gizi normal meningkat dari 48,6% menjadi 57,8% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan keberhasilan awal program penanganan stunting, meskipun upaya terpadu tetap diperlukan untuk mencapai hasil optimal. Berdasarkan Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) 2019, prevalensi underweight sebesar 16,29%, stunting 27,67%, dan wasting 7,44%. Di Sulawesi Selatan, prevalensi stunting pada 2022 mencapai 27,2%, menempatkan provinsi ini di peringkat ke-10 secara nasional. Jeneponto mencatat angka stunting tertinggi sebesar 39,8%. Strategi Nasional sejak 2018 menargetkan cakupan 514 kabupaten/kota pada 2021 dengan pendekatan

holistik. Mendukung tujuan internasional seperti SDGs dan WHA untuk mengurangi stunting hingga 40%, wasting di bawah 5%, dan meningkatkan praktik ASI eksklusif minimal 50%. Hambatan termasuk kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan SDM terlatih, dan rendahnya dukungan masyarakat. Berdasarkan kajian World Bank dan Kementerian Kesehatan, hanya 28,7% anak memiliki akses simultan ke layanan dasar seperti sanitasi, air bersih, dan ASI eksklusif. Intervensi Gizi Spesifik Fokus langsung pada penyebab stunting, seperti pemberian suplemen, imunisasi, makanan tambahan, dan pencegahan infeksi. Intervensi Gizi Umum Berkontribusi 70% dalam penanganan stunting, mencakup peningkatan akses makanan bergizi, pendidikan gizi, dan perbaikan sanitasi lingkungan. Program lintas sektor melibatkan berbagai bidang (kesehatan, pendidikan, pertanian, sosial) namun menghadapi kendala koordinasi, keterbatasan SDM, dan dukungan masyarakat. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan stunting. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat, Implementasi program terpadu dengan pendekatan berbasis data dan monitoring berkala, Edukasi gizi dan promosi pola hidup sehat secara berkelanjutan. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan prevalensi stunting di Indonesia dapat terus menurun sesuai target nasional dan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian berjudul “Implementasi Program Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Sinjai” menggunakan pendekatan kualitatif eksplanasi untuk memahami fenomena stunting secara mendalam dalam konteks alamiah. Fokus penelitian mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan dimensi inovasi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellu Limpoe dengan informan kunci seperti TIM Percepatan Penurunan Stunting dan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas, penelitian mengadopsi teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Penelitian bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting di daerah tersebut, dengan harapan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Implementasi Program Lintas Sektor dalam Penanganan *Stunting* di Kabupaten Sinjai**

Implementasi kebijakan *stunting* adalah proses penting untuk mencapai tujuan penurunan prevalensi *stunting*, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha. *Stunting*, yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah normal, memiliki dampak serius pada tumbuh kembang anak, termasuk gangguan otak, fisik, dan imunitas. Faktor penyebab *stunting* meliputi ekonomi, genetik, jarak kelahiran, dan defisiensi zat gizi. Pendekatan lintas sektoral menjadi fokus utama, dengan pengintegrasian program nasional dan lokal. Data lima tahun terakhir di Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan balita gizi kurang dan pendek sejak 2019-2023. Namun, meski balita kurus sempat meningkat hingga 2022, terjadi penurunan kecil pada 2023. Upaya penanganan *stunting* yang terkoordinasi dan terintegrasi perlu terus dioptimalkan. Data menunjukkan penurunan jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Sinjai dari 24 kasus (2022) menjadi 8 kasus (2023). Penanganan *stunting* di Kabupaten Sinjai melibatkan program lintas sektor dengan koordinasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti TPPS (Tim Percepatan Penanganan *Stunting*), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3AP2KB. Program ini mencakup kegiatan komunikasi, monitoring, evaluasi, dan aksi konvergensi, seperti pemberian makanan tambahan, tablet tambah darah, pemeriksaan antenatal care (ANC), serta edukasi ASI eksklusif. Pendampingan oleh PKH (Program Keluarga Harapan) dan pembagian bantuan sosial juga dilakukan untuk mendukung keluarga dalam pencegahan *stunting*.

**Tabel Status Gizi Balita di Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2023**

No	Tahun	Jumlah Balita	Balita Gizi Kurang		Balita Pendek		Balita Kurus	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2019	14.904	439	2,9	1.257	8,4	518	3,5
2.	2020	12.502	1.126	9,0	1.340	10,7	584	4,7
3.	2021	14.076	1.446	10,3	1.465	10,4	581	4,1
4.	2022	18.100	1.493	8,2	1.331	7,3	670	3,7
5.	2023	16.496	1.518	9,2	1.434	8,7	561	3,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai, 2024

Program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai dinilai efektif karena melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD, masyarakat, dan pemerintah desa. Indikator keberhasilannya meliputi pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita sebagai upaya peningkatan gizi dan pencegahan stunting. PMT diberikan dalam bentuk makanan bergizi seperti telur, susu, ikan, dan biskuit, yang diolah berdasarkan arahan petugas gizi di puskesmas. Program ini juga menyesuaikan metode distribusi makanan dengan kondisi setempat, seperti pemberian langsung ke rumah bagi yang tidak hadir di puskesmas. Sinergi antar sektor serta variasi menu dan metode intervensi menunjukkan komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting. Setiap sektor menjalankan tugas sesuai tupoksi, dengan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas program. Berdasarkan wawancara dengan beberapa OPD, program lintas sektor ini dinilai cukup efektif dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Sinjai.

**Tabel Data Penderita Balita Gizi Buruk di Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2023**

Tahun	Jumlah Balita	Balita Gizi Buruk	
		Jumlah	%
2022	18.100	24	0,1
2023	16.496	8	0,0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sinjai, 2024

Bantuan untuk anak yang terkena stunting di Kabupaten Sinjai bervariasi tergantung kondisi sosial ekonomi. Anak dari keluarga menengah ke atas hanya menerima bantuan dari pemerintah desa setempat berupa makanan olahan dan vitamin A, sedangkan keluarga miskin mendapatkan bantuan dari dinas sosial, seperti susu, biskuit, telur, dan ikan segar. Menu makanan yang diberikan disesuaikan dengan arahan petugas gizi di puskesmas masing-masing. Penyuluhan dan edukasi tentang stunting sudah dilakukan sejak remaja, termasuk pemberian tablet tambah darah, serta pendampingan bagi calon pengantin (catin) mengenai kesiapan menikah, hamil, dan melahirkan. Ibu hamil dan ibu dengan balita juga diberikan edukasi mengenai pencegahan stunting melalui kelas ibu hamil dan balita, serta pemeriksaan rutin di puskesmas. Bantuan sosial juga diberikan dalam bentuk beras fortifikasi atau mikronutrien untuk meningkatkan gizi, dan disalurkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menargetkan keluarga miskin dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting di wilayah tersebut.

## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung utama meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, petugas gizi, dan petugas kesling. Juga termasuk kader posyandu yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Anggaran Tersedianya anggaran yang memadai untuk masing-masing sektor yang terlibat mempermudah pelaksanaan tugas dan program, termasuk anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penyediaan sarana di fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit). Sarana yang memadai di fasilitas kesehatan dan sistem rujukan yang terpadu mendukung kelancaran pelaksanaan program. Dengan dukungan SDM yang memadai dan anggaran yang tersedia, program lintas sektor ini dapat berjalan lebih efektif. Di tingkat kabupaten, terdapat sekitar 600 orang yang memantau ibu hamil, dan pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan di setiap desa dengan melibatkan kader KB dan PKK. Dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai, terdapat pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa yang terdiri dari bidan, kader KB, dan kader PKK. Di tingkat kabupaten, sekitar 600 orang bertugas memantau ibu hamil. Dengan adanya dukungan SDM yang berkualitas dan anggaran yang memadai untuk setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat, penanganan stunting diharapkan dapat dilakukan secara efektif.

Pembagian tugas antar sektor yang terlibat dalam program lintas sektor juga penting. Setiap OPD memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, seperti Dinas Kesehatan yang memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Dinas Pendidikan yang melaksanakan pelatihan pencegahan stunting pada guru PAUD, Dinas Sosial yang memberikan jaminan sosial, Dinas PU yang menyediakan air minum dan sanitasi, serta Ketahanan Pangan yang berfokus pada pemanfaatan lahan pekarangan. Pembagian tugas ini bertujuan agar setiap sektor dapat fokus pada tupoksinya masing-masing, sehingga penanganan stunting dapat lebih efektif dan terkoordinasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai antara lain Rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan kondisi ekonomi. Masyarakat yang tidak datang ke posyandu sering kali harus didatangi petugas ke rumah,

yang memerlukan waktu lebih lama. Pembagian bantuan berbasis pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum sempurna, sehingga tidak semua anak stunting yang membutuhkan mendapatkan bantuan. Beberapa keluarga dengan anak stunting namun bukan dari keluarga miskin (misalnya, PNS) tidak terdata dalam DTKS. Beberapa kendala seperti kurangnya petugas gizi, belum optimalnya kerjasama lintas sektor, dan tingginya angka pernikahan dini yang berpotensi melahirkan anak stunting menghambat efektivitas program. Selain itu, sosialisasi terkait stunting belum maksimal, dengan banyak masyarakat yang baru mendapatkan informasi setelah anak mereka terdiagnosis stunting, bukan sebelumnya. faktor penghambat utama meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakmerataan distribusi bantuan, dan keterbatasan sumber daya serta koordinasi antar OPD yang terlibat dalam penanganan stunting.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di bab IV tentang implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program lintas sektor dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari adanya program pemerintah seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, penyuluhan dan edukasi, dan pemberian bantuan sosial. Adapun faktor yang mendukung Implementasi Program Lintas Sektor dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Sinjai terdiri dari SDM (Sumber Daya Manusia) dan anggaran yang tersedia, pembagian tugas antar sektor yang terlibat. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain kurangnya kesadaran masyarakat, tidak meratanya pembagian bantuan untuk anak stunting, belum maksimalnya penanganan stunting di masing-masing OPD yang terlibat.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, adapun yang menjadi implikasi dan rekomendasi dalam penelitian ini antara lain Dalam penanganan stunting di Kabupaten Sinjai, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), fokus pada beberapa hal yakni pemberian edukasi pada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu balita di posyandu setempat. Yang menjadi faktor penghambat DP3AP2KB dalam penanganan stunting adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh tim penanganan stunting. Diharapkan kesadaran masyarakat dalam mencari informasi terkait stunting baik sebelum menikah maupun setelah mempunyai anak, berpartisipasi dan rutin melakukan

pemeriksaan ke posyandu atau puskesmas terdekat. Dinas sosial fokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi kendala adalah terdapat sekitar 20% anak stunting yang tidak terdata di DTKS dikarenakan orang tuanya PNS sehingga tidak mendapat bantuan stunting. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Sosial menyalurkan bantuan stunting secara merata karena stunting tidak mengenal perbedaan status sosial.

Dinas Kesehatan fokus pada perbaikan gizi masyarakat seperti pemberian tablet tambah darah, vitamin A, imunisasi, dan pemberian makanan tambahan pada balita yang berat badannya tidak naik, dan berkurang untuk pencegahan stunting. Yang menjadi kendala adalah kurangnya petugas gizi, serta belum optimalnya kerjasama antar lintas sektor yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan stunting. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal penanganan stunting untuk menambah petugas gizi di masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Sinjai. Jadi, kendala tim penanganan stunting di Kabupaten Sinjai antara lain kurangnya petugas gizi, belum maksimalnya penyuluhan dan edukasi, belum optimalnya kerjasama lintas sektor dalam penanganan stunting di masing-masing organisasi perangkat daerah yang terlibat, dan masih maraknya pernikahan dini yang akan berpotensi melahirkan anak stunting karena masih dibawah umur. Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat dan semua sektor yang terlibat dalam penanganan stunting agar lebih maksimal dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya jurnal ini. Terima kasih kepada pembimbing, keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi selama proses penulisan jurnal ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative governance melalui program kampung KB di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 162–173.
- Rahmah, Mutia, and M. D. R. (2018). Kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di dusun rantaupandan kecamatan rantaupandankabupaten bungo provinsi jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 137– 154.

## JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 5 No. 4 (2024): Community Empowerment Hal: 124-136

DOI: 10.55314/jcomment.v5i4.863

- AB, Fitrawati. (2024). *Manajemen Sektor Publik. (Cetakan I. CV The Journal Publishing : Yogyakarta.*
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipas. Ghalia Indonesia.*
- Handayani, Nur, Dede Risa Nurmayanti, and R. N. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 32-40.*
- Hysing, E. (2022). Merancang tata kelola kolaboratif yang sesuai dengan tujuan: membuat teori dukungan kebijakan dan tindakan sukarela untuk keselamatan jalan raya di Swedia. *Jurnal Kebijakan Publik, 2, 201-223.*
- Abdul Wahab, S. (2012). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara.*
- Kjøndal, Kjerstin, dan J. T. (2022). Dinamika tata kelola lembaga: Bukti dari sektor keselamatan nuklir. *Kebijakan Dan Administrasi Publik, 4, 387– 409.*
- Millner, R., & Meyer, M. (2022). Tata kelola kolaboratif dalam Obligasi Dampak Sosial: menyelaraskan kepentingan dalam akuntabilitas yang berbeda. *Tinjauan Manajemen Publik, 5, 729–751.*
- Rafiudin, M., Agustino, L., & Haris, D. M. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.*
- Solichin, A. W. (1991). *Teori Implementasi.*
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Kebijakan Sosial. Penerbit Alfabeta.*
- Van Dijck, C., & Steen, T. (2023). Tekanan tersembunyi: pengaruh politisi terhadap proyek inovasi kolaboratif. *Tinjauan Internasional Ilmu Administrasi, 4, 996–1011.*
- Van Meter, Donald S., dan C. E. V. H. (1975). “Proses implementasi kebijakan: Sebuah kerangka konseptual.” *Administrasi & masyarakat.*
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center For Academic Publishing Service.*
- [https://panjatan.kulonprogokab.go.id/detil/871/pentingnya-peran-lintas-sektor- dalam-cegah-kasus-stunting](https://panjatan.kulonprogokab.go.id/detil/871/pentingnya-peran-lintas-sektor-dalam-cegah-kasus-stunting) (Adminpanjatan, 5 Oktober 2024)
- [http://dinkes.kapuashulukab.go.id/detil\\_info/114](http://dinkes.kapuashulukab.go.id/detil_info/114) (Puskesmas Selimbau, 5 Oktober 2024)

## **JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)**

EISSN: 2745-875X, Vol. 5 No. 4 (2024): Community Empowerment Hal: 124-136

DOI: 10.55314/jcoment.v5i4.863

<https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/489/menggandeng-lintas-program-dan-lintas-sektor-dalam-pelaksanaan-workshop-aksi-bergizi/> (Tim website Dinkes Yogyakarta, 1 Oktober 2024)

<https://cegahstunting.id/intervensi/> (Diakses pada 24 Agustus 2024)

<https://gizikia.kemkes.go.id/assets/file/pedoman/pedoman-proses-asuhan-gizi.pdf> (Doddy Izwardy, 6 Juli 2024)

[https://babelprov.go.id/artikel\\_detil/penanggulangan-stunting-melalui-pendekatan-lintas-sektor](https://babelprov.go.id/artikel_detil/penanggulangan-stunting-melalui-pendekatan-lintas-sektor) (Novita Frahesti Ade Wijaya, 6 Juli 2024)